

ABSTRAK

Implementasi program terbentuk dari kebijakan publik dimana pendekatan administrasi publik dikaitkan dengan birokrasi pemerintahan, perilaku implementasi dalam berbagai kebijakan publik akan mewarnai budaya organisasi birokrasi yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kinerja birokrasi dalam sistem administrasi publik secara keseluruhan. Pendekatan administratif dalam kebijakan publik berkaitan dengan pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penyediaan barang dan jasa publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi program Kotaku di Kabupaten Banjarnegara dengan melihat dari segi kepatuhan dan apa yang terjadi.

Penelitian ini dilakukan pada dua wilayah yang ada di Kabupaten Banjarnegara yaitu Desa Purwareja dan Kelurahan Karangtengah. menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada Implementasi Program Kotaku dalam penanganan kota kumuh di Banjarnegara dengan menggunakan teori Randal dan Ripley ditinjau dari perspektif *Compliance and What's Happening and Why?*

Hasil dari penelitian ini adalah di Kabupaten Banjarnegara khususnya di Desa Purwareja dan Kelurahan Karangtengah telah memberikan dampak nyata yang diharapkan oleh berbagai pihak, baik oleh instansi pelaksana yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan bagi masyarakat, program ini memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas umum. Implementasi program KOTAKU di Desa Purwareja dan Kelurahan Karangtengah dilihat dari dua aspek implementasi yaitu perilaku bertanggung jawab dan pemahaman penanggung jawab pelaksanaan kebijakan.pada rencana pemeliharaan infrastruktur dapat dilihat dari Aspek *What's Happening and Why* dilihat dari lima hal, antara lain jumlah aktor yang terlibat, kejelasan isi tujuan program, perkembangan dan kompleksitas program, partisipasi dalam program, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan yang tidak dapat dikendalikan. Aktor yang banyak terlibat di setiap desa dan kelurahan adalah Dinas PKPLH, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan, sejumlah Kelompok Swadaya Masyarakat. Kejelasan isi tujuan program KOTAKU di Desa Purwareja dan Kelurahan Karangtengah belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana. Implementasi program KOTAKU di Kelurahan Karangtengah dan Desa Purwareja secara bertahap sudah berangsur membaik, kompleksitas yang sering dialami oleh pelaksana kegiatan terletak pada penentuan prioritas pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sehingga apabila terdapat kebutuhan mendesak maka urutan prioritasnya harus dipikirkan kembali dengan tim pelaksana, serta masih terdapat beberapa hambatan di dalamnya seperti cuaca dan bencana alam.

Kata Kunci: Implementasi, Program KOTAKU, Kota Berkelanjutan

ABSTRACT

Program implementation is formed from public policy where the public administration approach is linked to government bureaucracy, implementation behavior in various public policies will color the bureaucratic organizational culture which ultimately influences the level of bureaucratic performance in the public administration system as a whole. The administrative approach in public policy is related to the government realizing community welfare through the provision of public goods and services. The aim of this research is to look at the implementation of the Kotaku program in Banjarnegara Regency by looking at compliance and what happens.

This research was conducted in two areas in Banjarnegara Regency, namely Purwareja Village and Karangtengah Village. uses a qualitative method that focuses on the implementation of the Kotaku Program in handling slum cities in Banjarnegara using Randal and Ripley's theory viewed from the perspective of Compliance and What's Happening and Why?

The results of this research are that in Banjarnegara Regency, especially in Purwareja Village and Karangtengah Subdistrict, it has had a real impact expected by various parties, both by implementing agencies, namely increasing community welfare and community trust in the government, and for the community, this program provides easy community access to public facilities. The implementation of the KOTAKU program in Purwareja Village and Karangtengah Subdistrict can be seen from two aspects of implementation, namely responsible behavior and understanding of the person responsible for implementing the policy. The infrastructure maintenance plan can be seen from the What's Happening and Why aspect, seen from five things, including the number of actors involved, clarity content of program objectives, development and complexity of the program, participation in the program, and factors influencing implementation that cannot be controlled. The actors who are heavily involved in each village and sub-district are the PKPLH Service, the Head of the Village/District Community Welfare Section, a number of Community Self-Help Groups. The clarity of the contents of the objectives of the KOTAKU program in Purwareja Village and Karangtengah Subdistrict has not been fully understood by implementers. The implementation of the KOTAKU program in Karangtengah Subdistrict and Purwareja Village has gradually improved. The complexity often experienced by activity implementers lies in determining priorities for infrastructure development and improvement, so that if there is an urgent need then the priority order must be rethought with the implementing team, and there are still several obstacles in it such as weather and natural disasters.

Keywords: Implementation, KOTAKU Program, Sustainable City